

**PERSEPSI HAKIM PA DAN ADVOKAT TERHADAP *JUDICIAL REVIEW*  
PASAL 43 AYAT (1) UU NO.1 TAHUN 1974  
TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DI LUAR  
PERKAWINAN DENGAN AYAH BIOLOGISNYA PASCA  
BERLAKUNYA PUTUSAN MK NO.46/PUU/VIII/2010.  
(Studi di Pengadilan Agama dan Kantor Advokat Kota Malang).**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**RIZCY ARISTA DITA**

NIM.0910113177



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah : PERSEPSI HAKIM PA DAN ADVOKAT TERHADAP *JUDICIAL REVIEW* PASAL 43 AYAT (1) UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DENGAN AYAH BIOLOGISNYA PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MK NO.46/PUU/VIII/2010. (Studi di Pengadilan Agama dan Kantor Advokat Kota Malang).**

Identitas Penulis :  
a. Nama : Rizcy Arista Dita  
b. NIM : 0910113177  
Konsentrasi : Hukum Perdata Murni  
Jangka Waktu Penelitian: 7 Bulan

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama



Ulfa Azizah,SH. Mkn.

NIP.19490623 198003 2 001

Pembimbing Pendamping



Yenni Eta Widyanti,SH.MH.

NIP. 19790603 200812 2 002

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H.,M.M.

NIP :19660622 199002 2 001

**PERSEPSI HAKIM PA DAN ADVOKAT TERHADAP *JUDICIAL REVIEW*  
PASAL 43 AYAT (1) UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG HUBUNGAN  
KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DENGAN AYAH  
BIOLOGISNYA PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MK  
NO.46/PUU/VIII/2010.**

(studi di Pengadilan Agama dan Kantor Advokat Kota Malang).

**Rizcy Arista Dita, Ulfa Azizah,SH. Mkn., Yenni Eta Widyanti,SH.MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Rizcy\_arist@yahoo.com

### **ABSTRAKSI**

Artikel ilmiah ini membahas Persepsi hakim PA dan advokat terhadap *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010, dimana dengan adanya putusan itu maka anak diluar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan selain dengan ibunya juga dengan ayah biologisnya. Putusan MK ini menimbulkan kerancuan karena MK kurang jelas merincikan “hubungan keperdataan” yang dimaksud putusan ini. Hal ini berdampak pada tugas Hakim PA dan Advokat, seorang hakim tidak dapat menolak untuk memutus sebuah perkara dengan alasan hukumnya kurang jelas dan menunggu sampai aturan lain yang mengatur, sedangkan pada advokat berdampak pula dalam tugasnya, advokat dianggap seorang ahli hukum yang memberikan jasa atau bantuan hukum, serta mewakili kliennya dalam perkara yang diajukan, karena tugasnya sebagai pemberi jasa hukum. maka seorang advokat sebagai ahli hukum harus mampu mengartikan peraturan yang berlaku, termasuk juga *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974,

karena itu masalah ini harus dianalisis sampai sejauh manakah hakim dan advokat paham dalam menilai hubungan keperdaan anak diluar kawin dengan ayah biologisnya, sehingga yang diharapkan dari pemahamannya dapat menghindarkan penyalahgunaan putusan, meminimalisir problematika yang timbul karena putusan ini juga memberikan informasi serta pemahaman mendalam kepada masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini menganalisa mengenai Persepsi Hakim PA dan Advokat terhadap *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 dan apa yang menjadi dasar Hakim PA dan Advokat dalam mengemukakan persepsinya mengenai *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi hakim PA terhadap *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yaitu hubungan keperdataan

hanya sebatas memberikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dengan orang tua untuk melakukan pendidikan dan pemeliharaan seperti nafkah, biaya pendidikan, kasih sayang dan pemberian penghidupan yang layak dan wajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya yang akan menunjang kehidupan anak. Sedangkan persepsi advokat terhadap *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 dapat diartikan keperdataan yang dapat diberikan yaitu hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dan orang tua untuk memberikan pendidikan, pemeliharaan seperti nafkah, perwalian, pengakuan status anak, perlindungan dan hak anak untuk mewaris sebagaimana hak tersebut sama dengan hubungankeperdataan yang didapat anak diluar kawin dari ibunya. Hakim dalam mengungkapkan persepsinya didasarkan pada; 1) Kepentingan dan hak asasi anak, 2) Akidah Hukum Islam. Advokat dalam mengungkapkan persepsinya didasarkan pada; 1) Terminologi Hukum Perdata, 2) Analogi Hukum, 3) Hukum Kebiasaan.

Saran dari penulis adalah agar tujuan dari putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 terwujud, hendaknya negara atau pemerintah membuat suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan MK ini dan hendaknya perlu disosialisasikan dan diberikan pemahaman mendalam terhadap masyarakat. Para pihak yang berkaitan dengan perkara yang menyangkut putusan MK No.46/PUU/VIII/2010, baik hakim, atau advokat. Harus melihat hubungankeperdataan yang dimaksud dari berbagai aspek hukum baik yang tertulis maupun yang hidup dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Persepsi Hakim PA dan Advokat terhadap *Judicial Review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Hubungan Keperdataan Anak di Luar Perkawinan dengan Ayah Biologisnya pasca berlakunya Putusan MK No.46/PUU/VIII/2010.

## ABSTRACT

This scientific article discuss perception judge PA and advocate to *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 after the entry into force MKNo.46/PUU/VIII/2010. The verdict MK causing confusion because MK less clear detailing the relationship keperdataan who referred to the verdict of this. This has an impact on the task of a Judge PA and Advocate, a judge cannot deny to disconnect a case by reason of the law is less clear and wait until other rules set, impacting anyway on duty of advocate. The advocate is considered a jurist who provide services or legal aid, as well as representing clients in litigation filed, because his duties as giver of legal services. then an advocate as a legal expert should be able to interpret regulations, including *judicial review* of pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, therefore this problem must be analyzed up to extent to which judges and advocates understand in assessing children's keperdataan relationship outside of marriage with her biological father, so that the expect from his understanding can prevent abuse verdict MK minimize problematika arising due to this ruling also giving information. Therefore, this research analyzes about the perception of Judge PA and advocate against the *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 regarding relationship keperdataan children outside marriage with her biological father after the enactment of the ruling MK No. 46/PUU/VIII/2010 and what is the basic of judge PA and advocate in its perception regarding the *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 ruling of the MK No. 46/PUU/VIII/2010

The results of the perception of the judge PA with respect to *judicial review* of pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, the relationship of keperdataan only as providing rights and obligations are reciprocal between children with parents to do education and maintenance as a living, education, compassion and giving a decent livelihood and reasonable in accordance with its own capabilities that will support the child's life. While the perception of an advocate relationship keperdataan between the child and the parents to provide education, child maintenance as a living, an example of a nafkah, guardianship, recognition the status of a child, protection, and right of the child to mewaris as those rights equal to keperdataan relationship a child outside of marriage from her mother. Judges in expressing his perception is based on; 1) Interests and the rights of the child, 2) Islamic law. Advocates in expressing his perception is based on; 1) terminology civil law, 2) Legal Analogy 3) the law of habit. Advice from writer is for the purpose of the enactment verdict MK No.46/PUU/VIII/2010 eventuate; should state or government makes a special regulation regulating the enforcement of the award verdict MK this and should need socialized and given understanding deep for society. The parties pertaining to verdict MK No.46/PUU/VIII/ 2010, for judge PA and advocate, should see relationship keperdataan from various legal aspects either written or living in society.

**Keywords:** The Perception of Judge PA and Advocate to *Judicial Review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 on relationship keperdataan children outside marriage with her biological father, after enactment the verdict MK No.46/PUU/2010.

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (untuk penulisan selanjutnya disingkat UU Perkawinan), dengan adanya UU Perkawinan maka sah perkawinan, diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan maka mempengaruhi status anak yang dilahirkan, dalam hal ini anak yang dilahirkan dapat dibedakan menjadi 2 golongan yakni anak sah dan anak tidak sah. Golongan pertama yaitu anak yang sah. Golongan kedua yaitu anak yang tidak sah biasa disebut juga anak diluar kawin.

Sebelum tanggal 17 february 2012, UU Perkawinan pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, namun sejak tanggal 17 Februari 2012 telah dibacakan oleh Majelis Hakim Putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 suatu ketentuan baru, mengenai pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yakni menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>1</sup>

Putusan MK itu bermula atas uji materi (*judicial review*) UU Perkawinan terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Machica binti H.Mochtar.<sup>2</sup> Putusan MK ini bersifat final<sup>3</sup> dan sudah diberlakukan. Namun setelah diberlakukannya *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan polemik dikarenakan kurang rincinya MK menjelaskan mengenai “status keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya”. Bagi MK *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan melindungi semua anak yang terlahir dari diskriminasi, namun bagi MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai pembimbing umat Islam, menganggap bahwa putusan MK

---

<sup>1</sup>. Putusan Mahkamah Konstitusi RI no.46/PUU/VIII/2010, hal 37.

<sup>2</sup>. *Ibid*, hal 1.

<sup>3</sup>. Lihat BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD 1945 Pasal 24C ayat (1).

tersebut dipandang sangat kontroversial di kalangan umat Islam.<sup>4</sup> Dimana hubungan keperdataan tidaklah sebatas dengan hak perlindungan saja tetapi dapat memiliki makna yang sangat luas sebagaimana dapat menimbulkan makna yang melekat pada anak sah. Putusan itu menimbulkan kerancuandalam beberapa aspek hukum, seperti asal usul anak, bila pengadilan mengakui asal usulnya anak luar kawin, sehingga mendapatkan legalitas memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, kemudian dituangkan dalam akta kelahiran maka membuka peluang besar anak luar kawin akan menuntut hak keperdataannya dari ayahnya. Di antara hak keperdataan tersebut adalah ketika terjadi kematian ayah biologisnya, tentu dia memiliki hak secara hukum untuk menuntut hak warisnya, begitu juga sebaliknya,<sup>5</sup> juga ketika anak luar kawin itu adalah seorang perempuan maka secara serta merta ayah biologisnya itu menjadi wali nikah, hal ini yang melanggar syariat Islam dan merubah tatanan Islam.

Polemik kurang rincinya *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan itu tidak bisa dihindari karena sampai sekarang masih belum ada upaya-upaya signifikan untuk menyelesaikannya, dan belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan pasal 43 ayat (1) pasca putusan MK ini, namun diluar itu semua, *judicial review* pasal 43 ayat (1) terlanjur harus dijalankan, hal ini lah yang berdampak pada tugas hakim khususnya hakim Pengadilan Agama yang berperan besar untuk memutus segala perkara yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat Islam, Pasal 10 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan hakim dituntut harus mampu menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan *judicial review*

---

<sup>4</sup>. Ahmad Mifdlol Muthohar, 2012, **Sebuah Catatan untuk Putusan MK Terkait Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, (online), <http://mifdlol.staff.stainsalatiga.ac.id/2013/01/28/sebuah-catatan-untuk-keputusan-mahkamah-konstitusi-mk-terkait-pelaksanaan-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, diakses tanggal (2 juli 2013)

<sup>5</sup>. Rio Satria(Hakim Pengadilan Agama Sengeti), 2011, **Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1))**,(online), [http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.badilag.net%2Fdata%2FARTIKEL%2FTinjauan%2520Keberadaan%2520Anak%2520Luar%2520Kawin.pdf&ei=EutsUtiBHomQrQfQrYCYAg&usg=AFQjCNEEb2FqZEa4ZOZyMtqt9bucL0SjEQ&sig2=KZUG8AYe\\_iTQNWf6NdnqSA&bvm=bv.55123115,d.bmk](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.badilag.net%2Fdata%2FARTIKEL%2FTinjauan%2520Keberadaan%2520Anak%2520Luar%2520Kawin.pdf&ei=EutsUtiBHomQrQfQrYCYAg&usg=AFQjCNEEb2FqZEa4ZOZyMtqt9bucL0SjEQ&sig2=KZUG8AYe_iTQNWf6NdnqSA&bvm=bv.55123115,d.bmk), diakses tanggal (2 juli 2013)

pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, karena bila dihadapkan oleh perkara tersebut, seorang hakim tidak boleh menolak dengan alasan hukum kurang jelas dan menunggu sampai ada aturan lain yang mengaturnya. Karena hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka hakim dapat melakukan Penemuan Hukum untuk mengartikan hubungan keperdataan anak diluar kawin dengan ayah biologisnya, maka bagaimana pemahaman seorang hakim Pengadilan Agama terhadap status keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya pasca putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 setelah melakukan penemuan hukum.

Tidak rincinya hubungan keperdataan yang dimaksud dalam putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 berpengaruh juga pada advokat. Advokat dalam tugasnya dianggap seorang ahli hukum yang memberikan jasa atau bantuan hukum, pemberian jasa tersebut bisa berupa nasehat hukum, pembelaan atau mewakili masyarakat yang menjadi kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan,<sup>6</sup> karena tugasnya sebagai pemberian jasa dan tidak ada pembatasan masalah yang dihadapi oleh advokat, maka seorang advokat sebagai ahli hukum harus mampu mengartikan peraturan yang berlaku, termasuk juga *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010, karena tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang memohon bantuan dalam perkara yang berkaitan dengan *judicial review* tersebut, dan tidak mungkin pula seorang advokat selalu menolak masyarakat yang membutuhkan bantuannya yang berkaitan dengan *judicial review* ini dengan alasan peraturan tersebut tidak jelas, jadi seorang advokat harus mampu mengartikan *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana untuk membela perkara kliennya yang menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>6</sup>.Mushlihin al-Hafizh, 2011, **Peran Advokat Berbagai Sisi**, (online), <http://www.referensimakalah.com/2012/09/peran-advokat-berbagai-sisi.html>, diakses (16 mei 2013).



## II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Persepsi Hakim PA dan Advokat terhadap *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010?
2. Apa yang menjadi dasar Hakim PA dan Advokat dalam mengemukakan persepsinya mengenai *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010?

## III. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis persepsi Hakim PA dan Advokat terhadap *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dasar Hakim PA dan Advokat dalam mengemukakan persepsinya, mengenai *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010

## IV. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *yuridis empiris* dengan metode pendekatan *yuridis sosiologis* untuk mengkaji dan meneliti Persepsi Hakim PA dan Advokat terhadap *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010, untuk memperoleh hasil yang relevan maka sumber data dilakukan dengan penelitian lapang di Pengadilan Agama dan Kantor Advokat kota Malang dan data diperoleh dengan cara *interview* dengan responden, kemudian data dianalisis dengan teknik *deskriptif kualitatif*.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persepsi Hakim PAdan Advokat terhadap *Judicial Review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010

#### a. Persepsi Hakim Pengadilan Agama

##### 1) Munasik ;

Hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang dimaksud dalam putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 adalah suatu hubungan yang dimohonkan oleh ibu kandung sang anak luar kawin yang dapat dibuktikan dengan DNA, sehingga melahirkan kewajiban bagi ayah biologis dan hak bagi anak luar kawin itu sendiri, untuk dapat terpenuhinya kebutuhan penghidupan anak luar kawin, seperti pendidikan, pemeliharaan, biaya pendidikan, nafakah dan kasih sayang.<sup>7</sup>

##### 2) Faisol Hassanuddin ;

Hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang dimaksud dalam putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 adalah hak yang diberikan oleh ayah biologis untuk anak luar kawin yang berupa nafakah, biaya pendidikan, kasih sayang, didikan dari ayah biologis dan jaminan masa depan anak, dimana hak-hak itu berlaku sampai anak dewasa, seperti yang tertuang dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat (1) dan (2) tetapi hak tersebut tidak menyangkut hal hak dalam nasab karena selain dalam putusan tersebut tidak disebutkan masalah nasab juga karena anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan MK dapat diklasifikasi dalam arti luas yang berarti bukan hanya dari perkawinan *sirri* tetapi termasuk anak zina dan anak sumbang, yang dalam Hukum Islam mengenal bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat bernasab kepada ayah biologisnya, jadi hubungan perdata yang dimaksud *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan itu hanya sebatas, pemeliharaan saja..<sup>8</sup>

<sup>7</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Munasik selaku Hakim Pengadilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang tanggal Selasa, 4 Juni 2013 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah

<sup>8</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Faisol Hassanudin selaku Hakim Pengadilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang tanggal Selasa 4 Juni 2013 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah

### 3) Murtadlo ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang dimaksud dalam *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan pasca putusan MK adalah, anak luar kawin yang dapat memohonkan haknya kepada ayah biologisnya untuk mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, seperti nafakah, dan biaya didikan<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan, hakim beranggapan hubungan perdata yang dimaksud putusan MK itu, hanya sebagai hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dan orang tua untuk melakukan, pendidikan dan pemeliharaan seperti nafkah, biaya pendidikan, kasih sayang, dan pemberian penghidupan yang layak dan wajar sesuai dengan kemampuannya yang dimilikinya, yang akan menunjang kehidupan si anak tersebut, dimana hubungan keperdataan itu tidak akan terputus sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri,

Walaupun selama ini masyarakat berpandangan masalah waris dan perwalian dalam perkawinan masuk kedalam hubungan keperdataan, dan hukum Islam melarang anak zina dan anak sumbang untuk mewaris dan mendapatkan perwalian nikah bagi anak perempuan, namun karena hubungan keperdataan tidak hanya waris dan perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, maka hal itu dapat diantisipasi dengan cara lain, sehingga mengenai waris dan hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan itu, diklasifikasikan kedalam nasab, yang berarti tidak termasuk yang dapat dimintakan dalam pengertian hubungan keperdataan pada putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 mengenai *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Hakim membedakan antara nasab dengan hak keperdataan. Kalau nasab harus ada ikatan perkawinan yang sah.<sup>10</sup> Permohonan agar anak tersebut dapat memiliki nasab dengan ayah biologisnya berbeda permohonannya dengan

---

<sup>9</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Murtadlo selaku Hakim Pengadilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang tanggal Selasa 4 Juni 2013 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah.

<sup>10</sup>. Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama kota Malang tanggal Selasa 4 Juni 2013 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah

permohonan hubungan keperdataan pada putusan MK No.46/PUU/VIII/2010, untuk masalah nasab dapat melakukan persidangan sendiri yang memiliki beberapa tahap, jalur, kriteria dan pertimbangan hukum yang mengantarkan pada sampainya anak tersebut dapat bernasab.<sup>11</sup>

#### **b. Persepsi Advokat**

##### 1) Haris Fajar ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang dimaksud putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 mengartikan hubungan keperdataan sebagai hubungan yang timbul karena ada dua pihak, yang melahirkan hak dan kewajiban antara bapak dengan anak dalam hukum keluarga seperti pendidikan, pemeliharaan dan semua hubungan keperdataan yang timbul karena korelasi antara anak dan bapak seperti waris, wali, kewajiban nafkah, dll.<sup>12</sup>

##### 2) Gunadi Handoko ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang dimaksud Putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 adalah hubungan privat yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hal keperdataan, untuk hubungan keperdataan yang dimaksud yaitu keperdataan keluarga yang salah satunya adalah pendidikan, pemeliharaan, status anak, perwalian, termasuk juga waris, karena putusan itu tertulis “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, berarti membawa dampak hubungan keperdataan tidak hanya pada ibunya tetapi juga pada ayahnya, dan tidak ada perbedaan hubungan keperdataan anak dengan ibunya dan ayahnya. karena menyangkut hak dan kewajiban yang sama, yang berarti bila anak bisa mewaris dari ibu berarti mewaris juga dari ayah.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Faisol Hassanudin selaku Hakim Pengadilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang tanggal Selasa 4 Juni 2013 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah.

<sup>12</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Haris Fajar selaku Advokat di kantor Advokat HARIS FAJAR, SH & Associates kota Malang tanggal Rabu 5 Juni 2013 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah.

<sup>13</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Gunadi Handoko selaku Advokat di Kantor Law Firm GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal Selasa 23 Juli 2013 pukul 14.20 WIB, data Primer diolah.

3) Moh.Nadzib Asrori ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang dimaksud dalam putusan MK No.46/PUU/VIII/2010, adalah hubungan keperdataan yang timbul karena adanya hubungan antara ayah dan anak dapat berupa hak pendidikan, pemeliharaan yang termasuk didalamnya nafkah, mengakui anak tersebut sebagai anaknya, termasuk juga waris, yang mana hubungan itu semua timbal balik, dan otomatis maka hak itu melekat pada masing masing pihaknya.<sup>14</sup>

4) Edwin Krinawanto ;

Hubungan Keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang dimaksud dalam Putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 adalah hubungan yang mengkaitkan satu pihak dengan pihak lain atau lebih yang secara timbal balik atau sepihak terhadap unsur hak dan kewajiban dalam hal ini hak hak anak luar kawin tersebut sama dengan hak-hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, seperti pendidikan, pemeliharaan atau pemenuhan penghidupan, perlindungan dan waris.<sup>15</sup>

5) Hartarto PakPahan;

Hubungan Keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang dimaksud dalam Putusan MKNo.46/PUU/VIII/2010 adalah hubungan antara anak dan ayah yang hubungannya telah diatur pada UU Perkawinan pasal 45 ayat (1) yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan dan juga termasuk hak mewaris yang mengikuti.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa Advokat berpandangan putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 melupakan dasar dari keabsahan perkawinan dan segala aspek-aspek yang menyertainya sehingga dapat mecederai hak-hak keluarga yang telah memiliki legalitas atas perkawinan yang sah bila seorang ayah biologis itu telah menikah

<sup>14</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Moh.Nadzib Asroriselaku Advokat di Kantor Law Firm GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal Selasa 23 juli 2013 pukul 14.20 WIB, data Primer diolah.

<sup>15</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Edwin Krinawanto,selaku Advokat di Kantor Law Firm GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal Rabu 14 agustus 2013 pukul 11.20 WIB, data Primer diolah.

<sup>16</sup>. Hasil wawancara dengan bapakHartarto Pakpahan,selaku Advokat di Kantor Law Firm GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal Rabu 21 agustus 2013 pukul 11.20 WIB, data Primer diolah.

sah terdahulu. Bagi advokat maksud *judicial review* pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yaitu hubungan perdata itu sebagai hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dan orang tua untuk memberikan, pendidikan, pemeliharaan contohnya nafkah, perwalian, pengakuan status anak, perlindungan dan termasuk hak anak untuk mewaris.

Advokat berpandangan pada kalimat “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya”, di dalam kalimat tersebut tidak ada perbedaan antara hubungan keperdataan yang dimiliki anak dengan ibu juga dengan ayah, otomatis hubungan keperdataan anak yang ada pada ibu juga diberikan ayah, hubungan keperdataan yang diberikan oleh ibunya diantaranya hak mewaris, jadi ayah biologis tidak hanya memberikan pendidikan, pemeliharaan, pemberian penghidupan dan perlindungan, tetapi juga dalam hal mewaris, oleh karena itu advokat beranggapan dalam implementasi untuk menjalankan putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 tidak semudah yang dibayangkan.

## **2. Dasar Hakim PA dan Advokat dalam mengemukakan persepsinya mengenai *Judicial Review* pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010.**

### **a. Dasar penilaian Hakim Pengadilan Agama dalam mengungkapkan persepsinya, yaitu;**

#### **1) Kepentingan Anak dan Hak Asasi Anak**

Kepentingan atau kebutuhan anak termasuk ke dalam hak asasi anak dan tidak ada perbedaan secara alamiah yang membedakan kepentingan atau kebutuhan seorang anak baik anak itu merupakan anak sah ataupun anak diluar kawin.<sup>17</sup> Karena itu, hukum haruslah memberikan jaminan yang adil atau perlindungan yang sama terhadap setiap anak, diluar anak tersebut dari hasil

---

<sup>17</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Faishol Hassanudin selaku Hakim Pengadilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang tanggal Selasa 4 Juni 2013 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah.

perkawinan yang sah ataupun anak diluar perkawinan, sesuai dengan apa yang diatur pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,<sup>18</sup> Bertumpu pula pada UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara khusus tentang hak asasi anak antara lain:<sup>19</sup>

Kata orangtua yang tercantum dalam pasal-pasal UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi anak tersebut seharusnya juga diartikan untuk orangtua biologis bukan hanya untuk orang tua secara hukum akibat perkawinan, karena setiap anak dilahirkan bukan hanya karena adanya perkawinan.

## 2) Akidah Hukum Islam

Karena Indonesia kental akan ke Islamannya, maka hukum Islam memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi penentuan dalam menafsirkan putusan Mk No.46/PUU/VIII/2010 Seperti yang diungkapkan oleh bapak Munasik selaku anggota hakim yang menyatakan: “penafsiran hubungan keperdataan yang dimaksud dalam putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 itu didasarkan pada Hukum Islam”<sup>20</sup>

Islam mengajarkan, bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT, dimana orang tua yang diberi amanat berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anaknya agar anak tersebut dapat berkembang dan orang tua yang menyalah-nyalakan amanat dengan mengabaikan kewajiban sebagai orang tua maka diganjar dosa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.: Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda ;

*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tidak mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang yahudi atau nasrani*

<sup>18</sup>. Lihat BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>19</sup>. Lihat Bagian Kesepuluh Mengenai Hak Anak UU Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>20</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Munasik selaku Hakim Pengadilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang tanggal Selasa, 4 Juni 2013 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah.

*atau majusi. Apakah kau melihatnya buntung (Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Darimi, an-Nasaiy, Ibn Jarir, Ibn Hibban, at-Tabraniy dan al-Hakim dari al-Aswad bin Suwaid)<sup>21</sup>*

Dari sabda tersebut menyatakan bahwa Islam juga memandang setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah atau suci, tidak memiliki dosa, dan tidak pula dibebankan dosa atas orang tuanya, karena pantas bagi anak dari sebab apapun mereka dilahirkan, dapat memiliki hak mereka untuk hidup dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya termasuk hubungan keperdataan, selain itu Islam mengajarkan pula, ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak diluar yang kebetulan adalah seorang perempuan, dan juga anak luar kawin tidak dapat bernasab kepada ayah biologisnya. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah<sup>22</sup>.

Telah diatur pula dalam KHI pada pasal 100 menyebutkan: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”<sup>23</sup>. Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 KHI menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.<sup>24</sup> Telah dijelaskan bahwa anak diluar kawin tidak dapat mewaris dan ayah biologisnya tidak dapat mendapatkan hak perwalian nikah bagi anak perempuannya, maka demi hukum Islam, hubungan keperdataan

<sup>21</sup>. Prof. DR. H. Ahmad Zahro, MA, 2012, **Al-Quran dan Tingkah Laku Manusia** (online) <http://www.masjidalakbar.com/ramadhan/linkmenu.php?namafile=rabu4>, diakses tanggal (17 juni 2013)

<sup>22</sup>. Negara Hukum, 2012, **Nasab dalam Hukum Perkawinan Indonesia**, (online) <http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukum-perkawinan-indonesia.html>, diakses tanggal (17 juni 2013).

<sup>23</sup>. Lihat Buku I tentang Hukum Perkawinan BAB XV mengenai Perwalian pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>24</sup>. Lihat Buku II tentang Hukum Kewarisan BAB III mengenai besarnya bagian pasal 186 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



yang dapat diberikan kepada anak diluar kawin hanya sebatas perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan saja.

**b. Dasar penilaian Advokat dalam mengungkapkan persepsinya yaitu:**

1) Terminologi Hukum Perdata

Advokat dalam mengungkapkan persepsinya di dasarkan pada terminologi hukum perdata<sup>25</sup>. Terminologi adalah pristinilahan atau ilmu tentang istilah dan penggunaannya.<sup>26</sup> Sedangkan Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum subyek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subyek hukum yang lain.<sup>27</sup> Terminologi Hukum Perdata adalah ilmu tentang penggunaan kata-kata yang tertera dalam definisi hukum perdata.

Dimana dengan pengertiannya yaitu hukum atau sistem aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban (hubungan keperdataan) orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat.<sup>28</sup> Maka diatur apa saja yang dapat diklasifikasikan ke dalam hukum perdata, yang biasa dikenal sebagai sistematika hukum perdata, sistematika hukum perdata, terdiri atas empat bagian, yaitu :<sup>29</sup>

- a) Hukum perorangan, yang berisi tentang kedudukan orang dalam hukum serta hak dan kewajiban serta akibat hukum yang ditimbulkannya ;
- b) Hukum keluarga, yang berisi tentang hubungan suami isteri, orang tua anak serta hak dan kewajibannya masing-masing ;

<sup>25</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Hartarto Pakpahan, selaku Advokat di Kantor Law Firm GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal rabu 21 agustus 2013 pukul 11.20 WIB, data Primer diolah.

<sup>26</sup>. Wikipedia, **Terminologi**, (*online*), <http://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi>, diakses tanggal (1 oktober 2013)

<sup>27</sup>. Komariah, **Hukum Perdata**, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2013 , hal 24.

<sup>28</sup>. Eliot Ciputra, 2013 , **Hukum Perdata**, (*online*)<http://oneofmyway.wordpress.com/2013/05/18/hukum-keperdataan/>, diakses tanggal (2 september 2013).

<sup>29</sup>. *Ibid*

- c) Hukum harta kekayaan, yang berisi sistem aturan tentang kedudukan benda dalam hukum serta berbagai hak-hak kebendaan yang bisa diperoleh orang ;
- d) Hukum waris, yang berisi tentang sistem aturan kedudukan benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan cara pembagiannya terhadap yang ditinggalkannya.

Di karenakan dalam sistematika hukum perdata juga menyangkut waris, dimana hukum warisan yang mengatur akibat-akibat adanya hubungan kekeluargaan terhadap peninggalan harta benda seseorang<sup>30</sup>, maka advokat beranggapan bahwa hubungan keperdataan yang dimaksud putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 bukan hanya kewajiban ayah untuk memberikan hak pendidikan dan pemeliharaan saja melainkan juga waris.

## 2) Analogi Hukum

Persepsi advokat juga didasarkan pada penganalogian hukum.<sup>31</sup> Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Menggunakan UU secara analogi, berarti bahwa memperluas berlakunya pengertian hukum atau perundang-undangan.<sup>32</sup>

Untuk menindak lanjuti kekosongan hukum dan untuk jalannya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 yang memberikan hak keperdataan terhadap anak diluar kawin dengan ayah biologisnya, maka penerapan prinsip hubungan keperdataan bagi anak luar kawin dapat dianalogikan dengan anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan oleh orang tua biologisnya yang diatur pada

<sup>30</sup>. Subekti, **Pokok Pokok Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hal 17.

<sup>31</sup>. Hasil wawancara dengan bapak Edwin Krinawanto, selaku Advokat di Kantor Law Firm GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal rabu 14 agustus 2013 pukul 11.20 WIB, data Primer diolah.

<sup>32</sup>. PKBH Universitas Ahmad Dahlan, 2012, **Penafsiran Undang-Undang secara Analogi**, (online), <http://pkbh.uad.ac.id/?p=79>, diakses tanggal (1 oktober 2013)

280 KUHPerdato; “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.<sup>33</sup> Dan dalam prakteknya anak luar kawin yang diakui memiliki hak dalam pemeliharaannya, dan hak untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupun bagian warisnya tidak sama dengan anak-anak sah. Berdasarkan pasal 863 KUHPerdato menyatakan; “jika yang meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atau sering suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian mereka yang sedianya harus mendapatkan andai kata mereka anak-anak sah.....”,<sup>34</sup> walaupun warisan yang diberikan tidak sebesar anak sah, anak luar kawin tetaplah dapat memiliki hak mewaris.

Pasal 865 KUHPerdato menyatakan ; “Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, maka anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya”.<sup>35</sup> Dengan ada pasal ini sewaktu waktu anak luar kawin dapat dipersamakan dengan anak sah, oleh sebab itu advokat menyatakan hubungan keperdataan yang diberikan oleh ayah biologis tidak hanya melakukan, pendidikan, pemeliharaan contohnya nafkah, perwalian, mengakui status anak, perlindungan dan pemberian penghidupan saja melainkan juga terdapat hak anak untuk mewaris.

### 3) Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah salah satu dasar advokat dalam mengungkapkan persepinya, dimana sejak dulu kala sebelum adanya hukum tertulis telah berlaku telah diakui dan diikuti oleh masyarakat yaitu hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan berasal dari perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal

---

<sup>33</sup>. Lihat Buku Kesatu tentang Orang BAB XI Bagian 3 mengenai Pengakuan Anak Luar Kawin pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>34</sup>. Lihat Buku Kedua tentang Barang BAB XII Bagian 3 mengenai Pewarisan bila ada anak-anak luar kawin pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>35</sup>. Lihat Buku Kedua tentang Barang BAB XII Bagian 3 mengenai Pewarisan bila ada anak-anak luar kawin pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang sama, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.<sup>36</sup> Dalam hukum kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum berlakunya putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 mengenal aturan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan dari ayahnya tidak. Yang berarti anak itu akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya anak tersebut mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya termasuk segala sesuatu bentuk pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya, jadi apabila hukum itu diubah oleh Putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 dengan menambahkan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya berarti hubungan dengan ayah diperlakukan sama dengan apa yang diberikan ibunya sebagaimana tidak ada kata-kata yang membedakan hubungan keperdataan antara yang diberikan ibu dan ayah.

## VI. PENUTUP

---

<sup>36</sup>. 2010, **Sumber Hukum Formal Kebiasaan**, (*online*)  
<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/05/sumber-hukum-formal-2-kebiasaan-costum.html>,  
diakses tanggal (2 oktober 2013)

## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan:

1. Persepsi dari hakim Pengadilan Agama dan Advokat :
  - a. Persepsi Hakim PA terhadap hubungan keperdataan dalam Putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 yaitu hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dengan orang tua untuk melakukan pendidikan dan pemeliharaan seperti nafkah, biaya pendidikan, kasih sayang dan pemberian penghidupan yang layak dan wajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya yang akan menunjang kehidupan anak.
  - b. Persepsi Advokat terhadap hubungan keperdataan dalam Putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 diartikan sebagai hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dan orang tua untuk memberikan pendidikan, pemeliharaan seperti nafkah, perwalian, pengakuan status anak, perlindungan dan hak anak untuk mewaris sebagaimana hak tersebut sama dengan hubungan keperdataan yang didapat anak diluar kawin dari ibunya.
2. Dasar Hakim Pengadilan Agama dan Advokat dalam mengungkapkan persepsinya yaitu:
  - a. Dasar Persepsi Hakim Pengadilan Agama: 1)Kepentingan anak dan Hak Asasi Anak 2) Akidah Hukum Islam
  - b. Dasar Advokat dalam mengungkapkan persepsinya yaitu: 1)Terminologi Hukum Perdata, 2)Analogi Hukum, 3)Hukum Kebiasaan

## **B. Saran**

Agar putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 berjalan sebagaimana tujuan yang diharapkan hendaknya negara atau pemerintah membuat suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan MK ini. Dan perlu disosialisasikan dan diberikan pemahaman mendalam terhadap masyarakat tentang makna putusan MK No.46/PUU/VIII/2010. Hakim PA dan Advokat melihat hubungan keperdataan ini harus dari berbagai aspek.

## **VII. DAFTAR PUSTAKA**

Komariah, **Hukum Perdata**, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2013.

Samidjo, **Pengantar Hukum Indonesia**, Bandung, CV Armico, 1993.

Suberkti, **Pokok Pokok Hukum Perdata**, Jakarta, PT Intermasa, 1984.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.46/PUU/VIII/2010

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ahmad Mifdlol Muthohar, **Sebuah Catatan untuk Putusan MK Terkait**

**Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, (*online*),

<http://mifdlol.staff.stainsalatiga.ac.id/2013/01/28/sebuah-catatan-untuk-keputusan-mahkamah-konstitusi-mk-terkait-pelaksanaan-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, diakses tanggal (2 juli 2013), 2012.

Eliot Ciputra, **Hukum Perdata**,

(*online*)<http://oneofmyway.wordpress.com/2013/05/18/hukum-keperdataan/>, diakses tanggal (2 september 2013), 2013.

Mushlihin al-Hafizh, **Peran Advokat Berbagi Sisi**,

(*online*),<http://www.referensimakalah.com/2012/09/peran-advokat-berbagai-sisi.html>, diakses (16 mei 2013), 2011.

Negara Hukum, **Nasab dalam Hukum Perkawinan Indonesia**, (*online*)

<http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukum-perkawinan-indonesia.html>, diakses tanggal (17 juni 2013), 2012.

PKBH Universitas Ahmad Dahlan, **Penafsiran Undang-Undang secara**

**Analogi**, (*online*), <http://pkbh.uad.ac.id/?p=79>, diakses tanggal (1 oktober 2013), 2012.

---

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizcy Arista Dita  
NIM : 0910113177  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Konsentrasi : Hukum/Hukum Perdata Murni

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

PERSEPSI HAKIM PA DAN ADVOKAT TERHADAP *JUDICIAL REVIEW* PASAL 43 AYAT (1) UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DENGAN AYAH BIOLOGISNYA PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MK NO.46/PUU/VIII/2010. (Studi di Pengadilan Agama dan Kantor Advokat Kota Malang).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang  
Pada tanggal : 27 Januari 2014.

Yang menyatakan



(Rizcy Arista Dita)